

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing.....	ii
Halaman Persetujuan Dosen Skripsi.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Intisari.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	10
2.2. Tahapan Pertambangan.....	10
2.3. Penggolongan Mineral.....	13

2.4. Pengertian Jumlah Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	13
2.5. Pengertian Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	13
2.6. Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	13
2.7. Pajak.....	14
2.7.1. Unsur Pajak.....	14
2.7.2. Fungsi Pajak.....	16
2.7.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.7.4. Tarif Pajak.....	18
2.7.5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	18
2.7.5 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	19
2.8. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21
2.8.1. Komponen – Komponen Pendapatan Asli Daerah.....	21
2.9. Kerangka Pemikiran Konseptual	23
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	24
3.2. Jenis dan Sumber Data	24
3.3. Alat Analisis.....	25
3.3.1. Analisis Perbandingan Nilai/Besaran Realisasi Pajak dan Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26
3.3.2. Analisis Kontribusi.....	26
3.3.3. Penilaian Pelaku Usaha Tambang Terhadap Diberlakukannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	28
3.4. Definisi Operasional Variabel.....	31
BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Daerah Kabupaten Sleman	33
4.1.1. Deskripsi Wilayah.....	33
4.2. Diskripsi Struktur Pertambangan Kabupaten Sleman.....	35
4.3. Perbandingan Nilai/Besaran Realisasi Pajak dan Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Sleman Sebelum dan Sesudah di Berlakukan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23	

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	35
4.4. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah Kabupaten Sleman	37
4.2. Penilaian Pelaku Usaha Tambang Terhadap Diberlakukannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	39
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Tahap Pertambangan	11
2.2. Kerangka Pemikiran Konseptual	23
3.1. Garis Kontinum	31
4.1. Peta Daerah Kabupaten Sleman	34
4.2. Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak MBLB Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016	36
4.3. Penilaian Pelaku Usaha Tambang Terhadap Diberlakukannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	44

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Keaslian Penelitian.....	8
2.1. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	20
3.1. Klarifikasi Kriteria Kontribusi	27
3.2. Skala Likert Untuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	30
3.3. Skor Kriterion	31
4.1. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2011 - 2016	38
4.2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2016.....	39
4.3. Penilaian Pelaku Usaha Tambang Terhadap Diberlakukannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016	50
2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016	51
3. Kuesioner	52
4. Hasil Kuesioner	55
5. Wewenang perizinan tambang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	58